KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Desak Lagi Ganti Bos BRIN
Tanggal : Rabu, 03 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Kasus Peneliti APH

DPR Desak Lagi Ganti Bos BRIN

SENAYAN masih menyoroti tindakan oknum peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengancam membunuh warga Muhammadiyah, hanya karena perbedaan penetapan Idul Fitri. Gara-gara tindakan tersebut, Senayan pun kembali mengungkit adanya rekomendasi DPR untuk mengganti Kepala BRIN.

Anggota Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, perilaku oknum BRIN berinisial APH sangat jauh dari sikap toleran. Padahal, peneliti harusnya lebih menghargai perbedaan.

"Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), mestinya tidak memihak satu keagamaan atau kelompok organisasi," tegas Saleh.

Politisi Fraksi PAN ini menegaskan, ancaman yang disampaikan oknum ASN BRIN tersebut sangat menodai kerukunan umat beragama. Bahkan, ungkapan ancaman membunuh tersebut merupakan ancaman serius yang harus ditindak oleh aparat penegak hukum.

Dia pun mengapresiasi sikap Polri yang telah melakukan penahanan kepada oknum ASN berinisial APH ini. Penahanan tersebut tindakan tepat dan menunjukkan komitmen Polri menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidisber) Bareskrim Polri menangkap APH di kediamannya di Jombang, Jawa Timur pada Minggu (30/4). APH saat ini telah dibawa ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan dan penahanan.

"Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang," kata Saleh.

Saleh menuturkan, perbedaan antarsuku dan agama itu hal biasa. Perayaan hari besar keagamaan nasional untuk umat Muslim ini pun selama ini dapat berjalan penuh khidmat walau terjadi perbedaan seperti dalam penetapan 1 Syawal.

"Kalau yang beda agama saja saling menghormati, kenapa yang hanya berbeda metode penentuan 1 Syawal malah seperti mau perang? Perbedaan itu bukan hanya sekali ini terjadi, dan tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun ratusan negara merayakan Lebaran pada 21 April," heran dia.

Sementara, anggota Komisi VII DPR Muyanto menilai, kasus APH itu salah satu indikator lemahnya penataan sumber daya manusia di BRIN pasca peleburan seluruh lembaga litbang.

Dia pun kembali mengungkit adanya rekomendasi Komisi VII DPR yang telah merekomendasikan secara resmi kepada Pemerintah terkait pencopotan Kepala BRIN.

"Komisi VII DPR telah dalam kesimpulan rapat kerjanya beberapa waktu lalu telah merekomendasikan secara resmi kepada Pemerintah untuk mengganti Kepala BRIN yang sekarang," kata Mulyanto.

Mulyanto berharap, Pemerintah dapat mempertimbangkan pengembalian lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke format semula agar proses pembinaan sumber daya para peneliti dan periset dapat optimal. Seperti Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Mulyanto menegaskan, ancaman pembunuhan terhadap sekelompok orang bukan perkara remeh yang dapat dimaklumi begitu saja. Sikap oknum peneliti BRIN ini justru memalukan, sekaligus membahayakan kehidupan beragama di dalam negeri.

Menurutnya, perbuatan APH ini makin menguatkan temuan Ombudsman bahwa, peralihan SDM BRIN bahwa rekruitmen peneliti tersebut melanggar prosedur, lemah koordinasi dan tidak dipersiapkan dengan baik.

Akibatnya banyak peneliti yang tidak dapat kursi serta tidak melaksanakan kegiatan penelitian karena terkendala dengan tugas-fungsi, peralatan lab, aset, struktur organisasi dan anggaran riset.

Walhasil, hingga hari ini masa transisi dan konsolidasi lembaga-lembaga riset dan litbang ke dalam BRIN belum tuntas. BRIN bakan telah menjadi lembaga superbody, tersentralisasi dan gemuk. ■ KAL